

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Dimulai dari deskripsi tentang tiap variabel, pemaparan penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran. Variabel yang dibahas antara lain tentang demokrasi, teori partai politik, fungsi partai politik, partai kebangkitan bangsa dan daerah mayoritas muslim di kabupaten pandeglang. Teori tersebut akan dipaparkan sebagai batas kesesuaian konsep yang digunakan, agar tidak mengakibatkan perbedaan pemahaman.

Berdasarkan tinjauan pustaka, peneliti menemukan banyak literatur yang membahas mengenai kekuatan partai politik dan partai politik berbasis islam. Namun, masih banyak sumber yang kurang eksplisit dalam membahas mengenai partai politik berbasis islam. Dalam literatur lainnya juga hanya sedikit yang membahas tentang kekuatan partai politik, terutama yang mengkaji konsep politik dalam pemilihan legislatif atau kontestasi politik.

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari beberapa skripsi yang ada, mengenai tema kekuatan partai kebangkitan bangsa selaku partai politik berbasis islam pada daerah mayoritas muslim, kiranya diperlukan dan dikedepankan sebagai bahan perbandingan dengan hasil penulis, baik dalam melihat kekuatan partai maupun tokoh dengan otoritas kharismatiknya dengan tujuan mendongkrak kekuatan suara partai hingga meningkat. Adapun beberapa Penelitian terdahulu yang penulis cantumkan ialah sebagai berikut.

Ahmad Fuad Fanani (2013), “Dilema partai politik islam: Terpuruk dalam kegagalan atau menjawab tantangan.” Pada tahun 2013. Penelitian ini membahas mengenai situasi dan kondisi yang dilematis bagi partai politik islam di masa sekarang, partai politik islam dianggap belum mampu melakukan inovasi dan terobosan yang cukup signifikan untuk bersaing dengan partai politik nasionalis.

Dalam penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor yang mendasari partai politik islam belum mampu memberikan terobosan dan pembaharuan maksimal, dengan kata lain bahwa partai politik islam harus mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini, memiliki harapan agar partai politik islam dapat melakukan kerja-kerja maksimal dalam mengangkat harkat martabat partai seperti dulu. Dan penelitian ini juga cukup bisa dijadikan sebagai referensi bagi para pembaca untuk mengetahui stagnasi partai politik islam dan solusi dalam hal tersebut seperti terobosan yang lebih baru, baik dalam strategi marketing, fungsi-fungsi partai dan lainnya.

Dalam Penelitian skripsi yang ditulis oleh Anyualatha Haridison (2013), dengan judul "*Kekuatan partai politik: Kasus pemilukada kota palangkaraya*" pada tahun 2009. Dimana skripsi ini membahas tentang kekuatan partai politik PDIP di kota palangkaraya. Kekuatan partai politik menjadi hal yang penting dalam segala hal, baik untuk melakukan tugas dan fungsinya dan juga melakukan terobosan melalui usulan kebijakan bagi pemerintahan.

Dalam kasus pemilukada tersebut, kekuatan partai politik dapat diciptakan dengan menggunakan kerja-kerja partai yang berkelanjutan. Namun dalam kekuatan partai yang besar di parlemen tidak menjamin bagi pasangan calon memenangkan kontestasi pemilukada di kota palangkaraya. Jika kita lihat dari sudut kekuatan di parlemen, PDIP menjadi pemenang pada pileg tahun 2009, hal ini menjadi suatu peristiwa yang sedikit mencengangkan dalam hasil keputusan pilkada di kota palangkaraya. Dengan kata lain, tidak ada jaminan kemenangan pemilukada dapat dimenangkan oleh partai yang memenangkan legislatif pada tahun yang sama.

Penelitian ini juga dapat di jadikan pengetahuan bagi para pembaca, agar nantinya dapat menganalisis lebih dalam terkait pengaruh dan jaminan partai politik dalam memenangkan pemilu. Adapun perbedaan dengan ini ialah pada lokus dan juga fokusnya, dimana dalam

ini yang menjadi titik fokusnya bukan partai politik berbasis islam melainkan kekuatan partai politik secara umum.

Selanjutnya dalam Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Bustomi (2015), dengan judul “*Kekuatan partai politik islam di daerah mayoritas muslim dalam perolehan suara pada pemilu tahun 2014 (studi kasus kab. Pandeglang)*” pada tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang kekuatan partai politik islam (PKS, PPP dan PBB) di kabupaten pandeglang yang menitikberatkan atau berfokus pada partisipasi masyarakat pada pemilihan legislatif di parlemen.

Dimana dalam Penelitian ini, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan partai politik, salah satunya di lihat dari berapa banyak kursi di parlemen, dalam penelitian ini melakukan pendekatan pada ranah saja tanpa adanya dari internal dan juga eksternal partai. Namun, dalam penelitian ini memiliki pesan positif bagi para pembaca, agar nantinya dapat memahami tentang merosotnya partisipasi terhadap partai politik islam seperti PKS, PPP dan PBB di kabupaten pandeglang.

Adapun perbedaan dengan ini ialah konteks pembahasan, dimana dalam ini membahas tentang partai politik islam (PKS, PPP dan PBB) dan yang dilakukan oleh penulis berfokus pada satu partai politik berbasis islam (PKB).

Selain dari pada itu, pada Penelitian yang di lakukan oleh M. Ridoi (2016), dengan judul “*Kekuatan figur dalam partai politik: Studi terhadap Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa*” pada tahun 2014. Dalam penelitian ini menjelaskan peran tokoh politik untuk mengangkat elektabilitas partai politik menjadi lebih baik dengan menggunakan otoritas kharismatik tokoh.

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh seorang tokoh atau figur politik yang terkemuka, beliau adalah Mantan Presiden RI Ke-4 yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dengan menggunakan teori tentang wewenang karismatik yang dikemukakan oleh Mark Webber, sangat

terlihat peran dan fungsi seorang tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap partai politik.

Selain dari pada itu, partai politik islam harus memiliki aktor ataupun penokohan yang kuat seperti dulu, sehingga Masyarakat mampu melirik dan juga memaknai nilai perjuangan yang di bawa ialah suatu hal yang sama dengan corak idensitas yang sama juga. Dalam penelitain ini dapat menjadi rujukan untuk mencoba menelisik kekuatan dan peran tokoh untuk menaikan elektabilitas partai politik berbasis islam (PKB) pada tahun 2014 di tingkat nasional.

Adapun Penelitian terakhir ialah yang di tulis oleh Dawud (2014) dengan skripsi yang berjudul *“Tingkat kepercayaan masyarakat muslim terhadap partai politik berasas islam (studi kasus di kecamatan kebumen pada pemilu 2014.”* Dalam Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berasas islam dengan menggunakan metode kuantitatif.

Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini ialah begitu lemahnya kepercayaan Masyarakat terhadap partai yang berasaskan islam di kecamatan kebumen. Tingkat tingkat kepuasan dan preferensi pilihan Masyarakat Muslim terhadap partai politik berasas Islam rendah (14%) dan belum mampu mengalahkan keunggulan dari kepercayaan Masyarakat Muslim terhadap partai politik barbasis masa Islam (23%) dan di luar keduanya (41%) yang disebabkan karena partai politik berasas Islam belum mampu mewakili aspirasi masyarakat.

Dengan berbagai penelitain yang tertera diatas, baik yang ditulis oleh Ahmad Fuad Fanani mengenai dilematis partai islam dalam menghadapi tantangan zaman pada hari ini. Penelitian yang ditulis oleh Anyualatha Haridison mengenai kekuatan partai PDIP dalam pemilukada kota palangkaraya, maupun yang ditulis oleh Bustomi mengenai kekuatan partai politik islam yang dilihat dari rekapitulasi perolehan suara legislatif serta M. Ridhoi yang mencoba menelisik otoritas kharismatik tokoh politik dalam meningkatkan elektabilitas dan kekuatan partai politik berbasis

islam, Penelitian Dawud mengenai tingkat kepuasan dan kepercayaan Masyarakat terhadap partai islam dan berbasis islam.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun kelima penelitian ini membahas mengenai kekuatan politik dan politik berbasis islam, belum dapat menjawab secara keseluruhan dikarenakan hanya melihat dari beberapa segmen saja. Berbeda dengan tulisan yang peneliti bahas, bahwa Penelitian yang akan dibahas mencakup pada beberapa faktor, diantaranya internal dan eksternal partai kebangkitan bangsa yang merupakan partai politik berbasis islam, Masyarakat, sipil, tokoh adat dan aktivis sosial. Dengan demikian jelas terdapat perbedaan antara kelima Penelitian diatas dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis.

B. Demokrasi

Sukarna mengutip dari perkataan Abraham Lincoln yang memberi pengertian bahwa *“Democracy is government from the people by the people and for the people”* (Budiardjo, 2008). Sehingga pemerintahan sistem demokrasi rakyatlah yang memegang kekuasaan sebab pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi dalam mewujudkan kebaikan umum menghasilkan dua hal penting. *Pertama*, tidak ada aturan pasti dalam mengambil keputusan dengan prinsip persamaan politik. *Kedua*, tidak terciptanya kondisi yang efektif dalam memberikan pertimbangan bagi semua warga yang pada praktiknya membutuhkan sistem pemerintahan yang ideal, dan pada gilirannya melanggar prinsip persamaan politik melalui pemberlakuan otonomi.

Joseph A. Scumpeter mengemukakan demokrasi dengan metode demokrasi sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang menjadikan peran individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Budiman, 1997).

Dalam pandangan Hobbes, yang terkait dengan Leviathan, demokrasi memiliki arti penting bahwa Masyarakat harus diatur untuk membatasi Hasrat kekerasan manusia, Hobbes juga menyatakan bahwa konsentrasi kekuasaan diletakkan pada suatu tempat yang dinamakan kedaulatan.

Banyak penilaian yang berbeda tentang demokrasi yang ditonjolkan dalam tulisan Rousseau. Dia menerima formula tradisional dari tiga dasar bentuk pemerintahan, tetapi membatasi definisinya tentang demokrasi dalam situasi Ketika pemerintah yang dijalankan secara langsung oleh masyarakat sebagai individu, dengan pemilihan representasi oleh Masyarakat. Dari definisi tersebut menurutnya tidak ada demokrasi murni yang selama ini masih bertahan atau minimal pernah berjalan.

Robert A. Dahl (Dahl, 1989) dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik yaitu:

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
3. Pembrebaran kebenaran, yaitu dengan adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis.
4. Control terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksekutif bagi Masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan.
5. Pencakupan, yaitu terliputnya Masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi, hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat, untuk mewujudkan pengertian tersebut, pemilihan

legislatif dipercaya sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, karena pada hakikatnya kedaulatan rakyat menjadi salah satu dasar terciptanya negara demokratis.

Menurut Ibnu Tri Cahyono dalam buku Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, menyebutkan bahwa pemilu merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Muhadam & Teguh, 2015).

Pemilu dalam negara yang menganut sistem demokrasi adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang aman sekaligus menjadi salah satu jalan tersalurkannya aspirasi dalam memilih seorang pemimpin pejabat publik baik di skala regional hingga nasional. Menurut Miriam Budiardjo pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur dari demorasi (Budiardjo, 2008), hasil dari pemilihan umum yang diselenggarakan dengan kebebasan berpendapat, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dianggap sebagai salah satu jalan akurat partisipasi rakyat.

C. Teori Partai Politik

Menurut teori institusional, partai politik pada awalnya terbentuk di tataran lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan anggota untuk berkomunikasi dengan guna mendapatkan dukungan dari mereka. Richard M. Merelmen menyatakan jika semua alat yang pernah dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan politiknya tidak ada yang lebih ampuh daripada partai politik (Rohaniah, 2015).

Dalam Penelitian ini lebih menekankan pada teori yang di gagas oleh Sigmund Neumann (1956) yang berpendapat bahwa Partai Politik adalah suatu perkumpulan/organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha dan mencoba untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan dan partisipasi rakyat melalui persaingan dengan

golongan-golongan yang mempunyai pandangan politik yang berbeda. (Neumann, 1956).

Adapun menurut Carl J. Friedrich (1967), mengemukakan bahwa Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir dan stabil dengan tujuan yang sama, untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan. Penguasaan yang di dapat oleh pimpinan partainya dan kekuasaan ini diberikan kepada anggota partainya, demi suatu kemanfaatan yang bersifat idil dan materil serta perkembangan lainnya.

Joseph Schumpeter dalam bukunya menyatakan jika partai politik adalah organisasi yang bertindak dalam hal perjuangan untuk mencapai kekuasaan. Partai dan para anggotanya merupakan contoh sederhana bagi anggapan atas ketidakmampuan Masyarakat pemilih untuk bertindak atas ketidakrapihan organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama dengan asosiasi perdagangan (Schumpeter, 1942).

Secara garis besar dapat disimpulkan jika partai politik adalah perkumpulan orang yang mempunyai gagasan kemudian bersatu untuk memperjuangkan demi menyelesaikan permasalahan dengan cara berkuasa, dengan perantara pemilihan sehingga dapat mengimplementasikan gagasan partai yang dituangkan dalam bentuk kebijakan.

D. Fungsi Partai Politik

Keberadaan partai politik tidak hanya dibentuk tanpa mempunyai tujuan dan fungsinya. Adapun fungsi utama partai politik adalah berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan berusaha mempertahankannya. Fungsi partai politik lainnya ialah:

1. Rekrutmen Politik

Gabriel Almond (1988) menyatakan jika rekrutmen politik merupakan suatu kesempatan awal bagi yang ingin terjun dan bergabung dengan organisasi politik serta sebagai momentum partai politik dalam menyeleksi kadernya agar menghasilkan kader yang

kompeten. Hal tersebut nantinya akan ditemukan karakteristik kandidat dengan sistem niat dan odeologi partai politik.

2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses memasyarakatkan suatu hal agar di kenal. Adapun yang dimaksud oleh sosialisasi politik adalah kontruksi perilaku, orientasi dan wawasan mengenai politik untuk Masyarakat, baik melalui Pendidikan politik maupun indoktrinasi politik.

3. Komunikasi Politik

Komunikasi dapat terjadi ketika sebagi partai politik menerima aspirasi, masukan atau harapan dari Masyarakat dalam penyampaian program politik untuk diperjuangkan menjadi suatu kebijakan. Melalui fungsi ini, partai politik sudah seharusnya melakukan dinamisasi dan kerja-kerja politik untuk menciptakan ruang konsolidasi dengan partai lainnya untuk menciptakan suatu kebijakan sesuai dengan aspirasi yang di dapat.

4. Pengendali Konflik

Konflik Masyarakat merupakan suatu hal yang tidak bisa di hindarkan apalagi dalam ruang lingkup Masyarakat yang heterogeny dengan berbagai macam kepentingan dan tujuan yang berbeda. Maka partai politik menjadi suatu wadah aspirasi dan kepentingan sehingga Masyarakat loebih legowo dalam menyampaikan kepentingan melalui partai politik.

E. Bentuk-bentuk Keanggotaan Partai Politik

Berdasarkan ideologi dan tujuan dari partai politik, partai dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu partai pragmatis, partai doktriner dan partai kepentingan.

1. Partai Politik Pragmatis

Partai politik pragmatis adalah partai politik yang memiliki tujuan dan agenda yang lebih kondisional dan tidak terbelenggu oleh doktrin dan haluan tertentu yang mengikat. Ideologi dan tujuan dari partai ini lebih ke menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi serta keadaan masalah yang di hadapi pada saat itu. Partai pragmatis ini berada pada sistem dua partai yang berkonstelasi secara seimbang seperti di Amerika Serikat Antara Partai Demokrat dan Partai Republik.

2. Partai Doktriner

Partai politik doktriner merupakan suatu partai politik yang memiliki program kerja dan kegiatan yang di sandarkan pada aspek ideologi partai yang di gunakan. Sehingga apapun yang dilakukan akan mengikuti lingkaran atas dasar kesepakatan penempatan ideologi tertentu yang di gunakan, yang menjadikan suatu harga mati bagi ruang gerak partai politik.

Pergantian kepemimpinan pada partai ini tidak terlalu penting, karena secara tidak langsung bahwasannya partai ini sudah mempunyai corak dan program dasar partainya yang telah di cantumkan dalam orientasi partai. Sebagai contoh dari partai doktriner ialah Partai Komunis di Korea Utara.

3. Partai Kepentingan

Partai kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibuat atas dasar kepentingan pribadi ataupun kelompok, entah atas dasar pemahaman, latar belakang daerah atau kesukuan. Contoh partai kepentingan ini ialah Partai Hijau di Jerman, Partai Buruh di Australia dan Partai Petani di Swiss.

F. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara jumlah partai politik yang ada dalam sistem politik yang ada. Menurut Maurice Duverger (1967) menyebutkan jika sistem kepartaian terbagi menjadi tiga.

1. Sistem Partai Tunggal

Sistem partai Tunggal ini memiliki dua pengertian. Ada yang menyebutkan jika dalam suatu negara hanya memiliki satu partai politik saja dan ada juga yang menyebutkan jika ada banyak partai dalam suatu negara namun hanya ada satu yang dominan, sehingga partai lainnya hanya dianggap sebagai pelengkap politik saja. Seperti halnya di negara Uni Soviet, Afrika, Kuba dan China.

2. Sistem Dwi Partai

Dalam kajian ilmu politik yang berkembang, sistem dwi partai ini bisa di artikan sebagai dua partai dari beberapa partai yang berhasil memenangkan hasil kontestasi dalam pemilihan umum secara bergiliran serta keduanya memiliki basis serta kekuatan yang dominan. Pada sistem ini hanya terdapat dua partai politik yang besar, ialah partai pemerintah dan oposisinya. Partai petahana yang memposisikan dan menjalankan kebijakan ataupun partai oposisi memposisikan sebaliknya. Sehingga dengan demikian, partai memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan segala kerja-kerja partai politiknya.

3. Sistem Multipartai

Dewasa ini kita kerap kali mengenal sistem multipartai ini, Dimana sistem multipartai ialah suatu sistem partai yang ada di suatu negara dengan terdiri dari beberapa partai politik. Dengan alasannya yang mengingat adanya keberagaman pemikiran maupun hal lainnya yang ada dalam suatu komoditas masyarakat. Sehingga perdebatan

tersebut mendorong kelompok-kelompok untuk membentuk suatu himpunan atau partai politik yang dapat menampung aspirasi kelompok mereka, sehingga mereka dapat menyuarakan aspirasinya melalui wakilnya di parlemen.

Adapun pandangan lainnya menurut Giovanni Sartori yang menyebutkan jika partai politik didasarkan atas ideologi yang dianut oleh suatu partai politik, yang dapat di klasifikasikan menjadi tiga bagian:

4. Sistem Kepartaian Pluralisme Sederhana

Sistem ini merupakan suatu sistem dalam sebuah negara yang hanya terdapat dua kutub partai yang berkompetisi dalam pemilihan juga polartias diantara kutub tersebut tidak ada. Kemudian arah kehidupan tersebut muncul menuju pada suatu integrasi, seperti halnya sistem dwipartai di Amerika Serikat.

5. Sistem Kepartaian Pluralisme Moderat

Sistem ini mempunyai kutub partai yang bipolar, negara yang mempraktikan sistem ini memiliki tiga partai yang berkompetisi dalam pemilihan umum yang menjadikan partai tersebut sebagai pertarungan basisnya. Hampir sama dengan sistem sebelumnya, namun terkadang sistem ini terdapat suatu bentuk polarisasi dari beberapa sudut kutub basis, seperti halnya Belanda yang menerapkan sistem demikian.

6. Sistem Pluralisme Ekstern

Sistem ini memiliki kutub partai yang lebih dari satu kutub, sehingga polarisasi diantara basis cukup besar dan berpengaruh. Sebuah negara yang menganut sistem ini biasanya memiliki banyak partai politik yang bertarung dalam pemilihan umum. Pola kehidupan politik pada sistem ini bersifat sentrifugal (mengembangkan sistem masing-masing partai dan menjauh dari pusat).

Sejalan juga dengan yang di kemukakan oleh Maurice Duveger bahwa negara Indonesia termasuk pada negara dengan Sistem Multipartai yang di anutnya. Jika yang di katakana oleh Giovanni Sartori dengan berbagai macam ideologi, budaya dan lainnya, maka Indonesia masuk pada Sistem Pluralisme Ekstern.

G. Partai Politik Islam dan Berbasis Islam

Partai politik adalah cara bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses menjalankan pemerintahan negara. Saat ini, partai politik telah menjadi sangat umum di masyarakat kita. Partai tidak hanya ada sebagai lembaga politik. Kelahirannya memiliki sejarah yang cukup panjang, tetapi masih cukup muda. Jika dibandingkan dengan organisasi negara, partai politik lebih muda dan lebih baru di dunia manusia. Selain itu, negara modern baru-baru ini memilikinya. Studi tentang partai politik baru muncul pada awal abad ke-20.

Dalam literatur politik, ada beberapa definisi partai politik. Secara umum, partai politik adalah suatu kelompok orang yang berbagi nilai, prinsip, dan tujuan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Pengertian partai politik telah dijelaskan secara komprehensif diatas. Jika dikaitkan dengan Islam, apa yang dimaksud dengan partai politik Islam? Islam dalam konteks ini dapat dipahami sebagai suatu doktrin agama yang harus di implementasikan dalam tatanan yang mengatur seluruh aktivitas dan prilaku manusia di dalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Islam merupakan agama yang luas serta menyeluruh dalam mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.

Dengan demikian, partai politik Islam dapat dipahami sebagai suatu organisasi publik yang secara tidak langsung memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam konteks yang berbeda-beda, mulai dari penguasaan struktur kelembagaan di pemerintah, baik pada ranah legislatif ataupun

eksekutif. Kemudian, proses mendapatkan kekuasaan itu dapat diperoleh melalui keikutsertaan partai politik dalam pemilu dengan melakukan kampanye yang sesuai serta mencoba untuk menjual isu dan program yang sesuai dengan partai politik dan tidak lepas dari nilai dan moralitas keislaman.

Dalam kajian dan pembahasan mengenai ilmu politik, penggunaan kata "*Partai Islam*" memiliki konotasi yang berbeda. Dalam sebaran ideologi organisasi, partai politik islam mencoba menjadikan Islam sebagai dasar ideologi partai. Ideologi organisasi sangat dianggap penting, sebab ideologi merupakan tujuan dan orientasi dari apa yang menjadi cita-cita. Ideologi juga menjadi alat pembeda dari satu partai dengan partai yang lainnya (Al-Hamdi, 2013).

Dalam pandangan yang lain mengenai partai politik Islam, Sudirman Tebba (1993) menyebutkan, jika partai politik Islam harus memiliki ciri yang merujuk pada nilai keislaman diantaranya seperti nama partai, asas partai, dan lambing partai. Partai politik dapat disebut sebagai partai Islam, apabila nama, asas dan lambangnya mengandung ciri dan unsur keislaman.

Jika dilihat pada konteks saat ini mengenai partai politik di Indonesia, hanya tiga partai politik di Indonesia saat ini yang terus menerapkan Islam sebagai ideologi politiknya: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak dapat dikatakan sebagai partai politik Islam dari perspektif konstitusi mereka, dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai partai politik Islam, namun partai ini disebutkan sebagai partai politik berbasis islam dengan dilihat dari sejarah berdirinya partai politik, PKB dengan Nahdlatul Ulama dan PAN dengan Muhammadiyah-nya. (Faisal, 2002).

Adapun partai politik berbasis islam merupakan partai yang hampir sama dengan partai islam, namun secara penggunaan asas dan ideologinya

berbeda. Partai politik berbasis islam merupakan partai politik yang memiliki asas Pancasila, namun secara gagasan dan basis terkuatnya berasal dari titah dan ajaran islam serta semangat perjuangannya selaras dengan perjuangan islam.

Dengan demikian, partai politik berbasis islam merupakan partai yang mencoba untuk mengkorelasikan nilai-nilai Pancasila dan keislaman, guna menciptakan nilai yang lebih banyak memberikan manfaat untuk masyarakat dari kebijakan dan lainnya. Secara tidak langsung partai politik berbasis islam merupakan partai yang moderat (pertengahan), dimana partai ini memosisikan dirinya sebagai partai pancasilais dan agamis. (Yugha, 2014).

Namun uraian yang telah di paparkan diatas, dapat dikatakan bahwa secara umum partai politik Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan partai politik yang berasaskan Islam dan partai politik yang berplatform Islam. Melainkan partai politik berbasis islam dengan ideologi Pancasila, seperti PKB yang masih berdiri digaris depan untuk membawa aspirasi dan kepentingan umat muslim dalam jumlah yang besar.

Bisa kita lihat secara seksama, bahwa secara tidak langsung partai kebangkitan bangsa juga menggunakan beberapa berbagai simbol yang mencirikan substansi keislaman yang terorganisir dan mempunyai nilai dan moralitas serta cita-cita yang sama dengan partai politik islam serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional, dan yang paling utama ialah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat di kancah nasional maupun regional. (Ali Ahmad, 2010).

Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki basis masa umat islam seperti Nahdlatul Ulama, yang menjadikan magnet kuat untuk mempengaruhi kekuatan partai politik. Partai kebangkitan bangsa yang berdiri tanggal 23 juli 1998 dengan penerapan Pancasila sebagai asas partainya, dalam pembahasan Ketika pembentukan partai menghasilkan

beberapa rancangan seperti, Pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik dan hubungan partai politik dengan Nahdlatul Ulama.

Adapun hubungan PKB dengan NU pasca Gusdur sedikit mengalami perubahan namun tidak signifikan. Walaupun ada beberapa pasukan yang menarik diri namun sejatinya NU masih memiliki kedekatan sangat baik dengan PKB di kabupaten pandeglang. Sehingga PKB merupakan partai yang beririsan dengan Nahdlatul Ulama, peran dan tugas dalam Gerakan yang dilakukan NU terhitung dari dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Sehingga tokoh ulama dari NU kerap kali muncul ke permukaan, terlebih adanya partai kebangkitan bangsa yang menjadi magnet keseriusan NU dalam partisipasi politik di negara kesatuan republik indonesia (Syafiie, 2015).

H. Tujuan Partai Politik Berbasis Islam (PKB)

Dalam kajian partai politik, tujuan dari partai politik berbasis Islam tidak terlepas dari suatu institusi negara yang menjadi media bagi partai politik untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. Sejatinya tujuan partai Islam telah jelas di sebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi "*Baladun thayyibun warabbun ghafur*" yang memiliki arti demi terwujudnya suatu negara yang terdiri atas kebijakan yang adil, serta di ridhai oleh Allah SWT. Dari tujuan tersebut, memiliki berbagai macam rumusan yang harus di tafsirkan melalui kajian keislaman (Mudzakir. A.S., 2016).

Bergantung pada konteks budaya, politik, dan sejarah setiap negara, partai kebangkitan bangsa sebagai partai berbasis islam memiliki berbagai tujuan. Adapun tiga tujuan utama partai berbasis Islam diantaranya:

1. Penegakan nilai-nilai islam. Partai politik berbasis Islam sering berusaha untuk memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam kehidupan masyarakat dan negara, termasuk memasukkan etika dan moral Islam ke dalam kebijakan publik, perundang-undangan, dan struktur pemerintahan.

2. Partai berbasis Islam sering memprioritaskan peningkatan pendidikan dan pemahaman Islam dengan membangun sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam untuk mencetak generasi yang memahami dan mengamalkan ajaran agama.
3. Masyarakat yang mendapatkan keadilan. Keadaan dimana seluruh Masyarakat dalam suatu negara tidak ada yang merasa terpinggirkan ataupun terintimidasi dari kehidupan yang luas. Selain dari pada itu, mendapatkan hak-haknya sebagai salah seorang warga negara. Keadilan tersebut meliputi segala hal yang melekat pada diri mereka sendiri seperti, hak hidup, hak berbicara, hak mendapatkan keamanan, dan lainnya.
4. Masyarakat yang Makmur dan sejahtera. Setiap manusia sudah pasti menginginkan hidup dalam kebahagiaan. Dan salah satu indicator hidup bahagia adalah memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran hidup yang diciptakan oleh seksama.
5. Masyarakat yang mendapatkan rasa aman dan nyaman. Ini merupakan salah satu fungsi dari institusi negara, dimana untuk membuat warganya merasa lebih aman dan nyaman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan lainnya. Sedangkan kata nyaman adalah suatu rasa kebahagiaan jika dilihat dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan atau daerah tertentu.
6. Perdamaian dan Toleransi. Meskipun beberapa partai berbasis islam terkadang dianggap eksklusif, mereka sebenarnya mendukung perdamaian dan toleransi dalam hubungan antara agama dan etnis. Ini dilakukan sesuai dengan prinsip Islam rahmatan lil 'alamin, yang berarti rahmat bagi semesta alam.
7. Kedaulatan Politik dan Kebangsaan. Partai berbasis Islam berusaha mempertahankan identitas kebangsaan yang plural sambil memperjuangkan kedaulatan politik yang selaras dengan prinsip Islam.

Dengan demikian, dapat dikatakan jika tujuan dari partai politik Iberbasis islam adalah untuk menjadikan masyarakat merasa lebih

memiliki keamanan dan tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan ataupun gangguan dari Masyarakat sekitar (Al-Hamdi, 2013).

I. Gambaran Umum Daerah Mayoritas Muslim Kabupaten Pandeglang

Pandeglang sebagai salah satu daerah di provinsi banten yang memiliki catatan historis tembusan hingga kesultanan Banten dan telah terbukti sebagai daerah yang strategis. Hal ini bisa dilihat dari berbagai peninggalan yang tertulis maupun tidak tertulis yang terdapat di wilayah kabupaten Pandeglang. Semua ini bukan hanya pada benda yang berwujud, melainkan membekas juga pada kultur dalam kehidupan masyarakat Pandeglang (Supriatna, 2017).

Peninggalan sejarah kesultanan Banten masih bisa kita lihat dengan jelas, baik dalam kehidupan sosial hingga seni budaya yang tersebar di Pandeglang. Diantaranya ialah Pandeglang yang masih menggunakan budaya sosial yang masih kental dengan kebudayaan khas banten serta pandeglang terkenal memiliki julukan sebagai Kota Santri yang terkenal dengan daerah yang agamis. Julukan ini tidak timbul dengan sendirinya, eksistensinya tercatat dalam sejarah dan hingga saat ini di yakini oleh mayoritas masyarakat pandeglang (Purnomosidi, 2015).

Pada saat ini Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang strategis di Provinsi Banten. Sejarah mencatat, bahwa banyak kalangan Masyarakat Pandeglang dengan para tokohnya memberikan sumbangsih serta turut andil dalam pembentukan Provinsi Banten, tercatat jika pada bulan Agustus 1999 di bentuknya Badan Pekerja Komite Pembentukan Provinsi Banten di Kampung Pari, Mandalawangi Pandeglang.

Menurut Kurdi Matin (2015) menyebutkan jika pandeglang mengambil peran penting dalam penyebaran kultur budaya banten hingga membentuk corak masyarakat banten yang multikultur, dimana masyarakat banten memiliki banyak budaya yang berbeda dari tiap wilayahnya. Masyarakat pandeglang memberikan usulan yang di terima oleh seluruh masyarakat banten dengan menekankan rasa "*Persaudaraan*"

yang tinggi, dengan menggabungkan antara beberapa kepentingan baik dari golongan Ulama maupun Jawara (Matin, 2015).

Provinsi banten berdiri terhitung dari tanggal 04 Oktober tahun 2000. Hingga saat ini terdiri dari 8 kota/kabupaten diantaranya: Kota Serang, Cilegon, Tangerang dan Tangerang Selatan serta Kabupaten Pandeglang, Serang, Tangerang dan Lebak. Dalam ranah pemerintahan di kabupaten pandeglang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.32.526 tanggal 08 November tahun 2000 tentang pengesahan bupati pandeglang, dari pasangan H. A Dimiyati Natakusumah dan H. M. Mudjio A. Satari yang dilantik sebagai bupati pandeglang yang sah setelah berdirinya provinsi banten.

Sejarah Pandeglang mencatat juga, bahwa saat dipimpin oleh Bupati H. A. Dimiyati Natakusumah mengalami beberapa kemajuan dari berbagai sektor. Semisal dalam ranah Pendidikan, keagamaan serta sosial. Dalam ranah Pendidikan, Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Pandeglang bebas biaya sekolah dan pada tahun 2007 serta mulai melakukan pembangunan infrastruktur sarana pendidikan dengan merata (Purnomosidi, 2015).

Pada saat ini, pemerintah daerah kabupaten pandeglang terus melakukan perbaikan dari segi infrastruktur dan lainnya, sehingga dapat menunjang dalam berbagai bidang termasuk teknologi informasi. Misalnya dalam pelayanan masyarakat, Mal Pelayanan Publik yang baru berdiri 2 tahun sudah mendapatkan penghargaan sebagai pelayanan prima dengan nilai A dari Kemenpan RB dan meluncurkan sekitar 1.173 pelayanan publik hingga pada tahun 2020. Bupati pandeglang yang terhitung sejak 2016 banyak melakukan perubahan walaupun belum signifikan dan sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat pandeglang (Pemkab Pandeglang, 2020).

Wilayah Kabupaten Pandeglang lebih tepatnya berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten dan secara posisi geografis terletak antara 6o21' – 7o10' Lintang Selatan (LS) dan 104o48' – 106o11' Bujur Timur

(BT), dengan luas wilayah 2.747 Kilometer persegi atau sebesar 29,98% dari luas wilayah provinsi Banten dengan titik koordinat 6.3092oS 106.1047oE, dengan batas administrasi dari sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Adapun di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Selat Sunda.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika pada tahun 2022 adalah 1.307.090,00 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 670.356,00 jiwa dan perempuan sebanyak 636.734,00 jiwa. Persebaran persentase penduduk berdasarkan dari jenis kelamin ini pun menandakan bahwa angka rasio penduduk Pandeglang sebesar 105,28. Artinya, ada 102 pria di antara 100 orang wanita di Kabupaten Pandeglang. Sebaran penduduk per-kecamatan relatif tidak merata. Kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu Kecamatan Cibitung sebanyak 22.109,00 jiwa, sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Mandalawangi, yaitu sebanyak 57.592,00 jiwa (BPS Pandeglang, 2022).

Dalam nilai-nilai keagamaan yang tersebar di kabupaten pandeglang, kebebasan beragama ialah hak dasar setiap warga negara yang di jamin secara penuh oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29 yang menyebutkan bahwa *“Negara Indonesia berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa dan negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.”* Masyarakat kabupaten Pandeglang secara historis dan kebudayaan ialah masyarakat yang sangat menjunjung nilai-nilai keagamaan/agamis. Terbukti dari adanya aspek budaya lokal bercampur dengan tradisi Islam, menghasilkan praktik keagamaan unik seperti tahlilan, hajat laut, dan lainnya. Identitas budaya dan keagamaan masyarakat Pandeglang sebagian besar dibentuk oleh Kesultanan Banten.

Jejak sejarah ini dapat ditemukan di berbagai tempat religius, seperti makam-makam wali dan Masjid Agung Pandeglang (Hasan, 2006).

Hal ini ditandai dengan besarnya rasa semangat masyarakat untuk melaksanakan dan menerapkan ajaran-ajaran keagamaan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di kabupaten Pandeglang. Kondusifnya suasana kehidupan beragama di Pandeglang ini tercermin dari keharmonisan hubungan antar pemeluk agama yang ada (Mu'izzuddin, 2017).

Kabupaten Pandeglang terletak di bagian barat Provinsi Banten dengan mayoritas muslim terbesar, hingga mencapai presentase 99,84% jumlah penduduk beragama islam. Adapun jumlah sarana peribadatan yang tersebar di kabupaten pandeglang berdasarkan catatan Badan Pusat Statistika Kabupaten Pandeglang pada tahun 2019, terdapat 995 buah Masjid, 1.317 Mushola dan 2 Greja Kristiani.

Untuk meningkatkan Pendidikan dalam bingkai keagamaan bagi masyarakat pandeglang, pada tahun 2019 pemerintah kabupaten pandeglang sudah melakukan kebijakan dengan mengoperasikan 167 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 206 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 89 Madrasah Aliyah (MA). Dengan demikian, secara tidak langsung jumlah dari komposisi penganut agama di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh penganut agama Islam, sedangkan sebageian kecil lainnya ialah penganut agama lain yang di akui oleh negara secara sah (BPS Pandeglang, 2019).